

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula kompleksitas permasalahan dalam hal pembangunan ekonomi. Dalam upaya menghadapi era globalisasi dan persaingan ekonomi global yang kian meningkat, maka pemerintah perlu merancang strategi taktis yang komprehensif dan efektif dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan kemampuan pada sektor ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting karena sektor ekonomi merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pemerintahan suatu negara (Sarfiah et al., 2019).

Dewasa ini, fokus permasalahan pembangunan ekonomi tidak hanya dari aspek pembangunan secara fisik saja, tetapi juga meliputi pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal penting bagi tercapainya kesuksesan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang bersifat *people centered*, *empowering*, dan *sustainable* (Habib, 2021). Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, maka itu berarti pemerintah turut memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana pembangunan ekonomi. UMKM merupakan pilar utama dalam menyokong pertumbuhan ekonomi. Keberadaan UMKM berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Mane et al., 2022). Artinya, UMKM merupakan sektor usaha yang menduduki posisi vital dan strategis dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi nasional.

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang tahan banting pada saat terjadi kondisi krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Hal tersebut terbukti selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 silam, yang mana UMKM mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi ketika terjadi krisis. Hal tersebut tentunya tak lepas dari program dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Soleha, 2020). Hal tersebut selaras dengan hasil temuan yang dikemukakan oleh (Amboningtyas et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa UMKM dianggap sebagai katalisator dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Peran UMKM dinilai mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah dalam menggerakkan tuas perkembangan ekonomi pada sektor produksi di berbagai bidang usaha. Potensi besar yang dimiliki oleh UMKM merupakan juru kunci dalam perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu,

pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu menyediakan wadah yang dapat memicu perkembangan dan pengelolaan UMKM menjadi lebih baik.

Tercatat per tahun 2020, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa (Bbc.com, 2020; Diakses pada tanggal 17 September 2021) . Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mencatat berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016 dan survei pertanian antar sensus (SUTAS) tahun 2018 terdapat 9.782.262 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari 9.133.859 usaha mikro, 579.567 usaha kecil, dan 68.835 usaha menengah (Departemen Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2018, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sudah mencapai 64,2 juta unit dengan menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 60% (Kusumawardhany, 2020). Selain itu, kontribusi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja, tercatat hingga tahun 2019 sebesar 119.562.843 juta atau 96,92% dari tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 2,21% dari total seluruh tenaga kerja di Indonesia (Kementrian KUKM, 2021).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa peranan besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penopang untuk membangun perekonomian di Indonesia. Ini juga dapat dilihat dari adanya

krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dimana saat perusahaan – perusahaan besar banyak yang mengalami kebangkrutan, sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih bisa bertahan dalam kondisi krisis, hal ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM selalu menjadi garda terdepan dan pahlawan ekonomi, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadinya krisis (Liputan6.com, 2020. Diakses pada 17 September 2021).

Apabila UMKM dapat dikelola dengan baik dan profesional, tentunya hal tersebut akan menciptakan pondasi yang tangguh bagi perekonomian nasional. Keberlangsungan UMKM yang dikelola secara baik dan profesional tak luput dari peran pengelolaan administrasi yang baik pula. Sayangnya, permasalahan utama dalam pengelolaan administrasi UMKM adalah terkait pencatatan laporan keuangan dalam operasional usahanya (Rainanto, 2019).

Salah satu problematika yang harus dihadapi para pelaku UMKM saat ini adalah tentang pengelolaan dana, seperti yang kita ketahui bahwasannya dengan adanya pengelolaan dana yang baik maka itu adalah salah satu kunci utama kesuksesan sebuah usaha, bahkan keberhasilan dan kegagalan suatu UMKM dapat dilihat dari bagaimana cara mereka mengelola dana usahanya masing – masing. Salah satu cara alternatif yang sangat mudah untuk diterapkan adalah dengan menerapkan pencatatan akuntansi pada usahanya, dengan diterapkannya akuntansi dapat membantu pelaku

UMKM untuk dengan mudah mengatur perputaran uang usahanya, serta dapat membantu untuk memperoleh informasi keuangan usahanya, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan mempertahankan usaha.

Dengan adanya akuntansi dalam kegiatan UMKM dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui laba dan langkah apa yang akan diambil (Kusumawardhany, 2020). Dengan akuntansi yang memadai maka UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan menghitung pajak (warsono, 2010 dalam Kusumawardhany, 2020).

Secara umum Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah yang dimana potensi UMKM yang perlu dikembangkan karena UMKM di Kabupaten Ngawi semakin hari semakin bertambah. Hal itu disampaikan Kepala Dinkop - UM Kabupaten Ngawi, Harsoyo, Jumat (26/03/21). "Kalau di data kita itu ada 84 ribu, tepatnya 84.729 UMKM di Kabupaten Ngawi," ungkapnya kepada TIMES Indonesia (M. Miftakhul, Maret 2023). Hal ini merupakan tugas yang perlu jadi perhatian dari pemerintah setempat apabila ingin memaksimalkan potensi sektor industri UMKM. Sebagian pelaku UMKM masih belum mampu dalam mengatur keuangan usahanya dengan baik, karena hasil pendapatan yang didapatkan dari penjualan dijadikan satu dengan dana pribadi dan akan dijadikan sebagai modal untuk berikutnya.

Penelitian ini mengambil objek beberapa UMKM di Kecamatan Ngawi Kota. Kecamatan Ngawi Kota sendiri memiliki 12 desa dan 4 kelurahan. Alasan saya memilih Kecamatan Ngawi Kota karena banyaknya UMKM yang semakin berkembang. Keberhasilan UMKM bukan hanya dari pelaku UMKM tersebut, tetapi juga dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain: a) Jiwa kewirausahaan; b) Kreativitas yang menciptakan inovasi; c) Bahan baku yang memadai; d) Dukungan finansial; e) Teknologi dan infrastruktur yang memadai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2015) yang meneliti mengenai penerapan akuntansi pada UMKM serta persepsi pelaku UMKM dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan akuntansi UMKM di Kelurahan Drajat Kota Cirebon. Diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi pada UMKM di 4 Kelurahan Drajat Kota Cirebon dinilai sangat rendah karena UMKM kurang memiliki motivasi atau keinginan untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Persepsi pelaku UMKM beranggapan bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit dan tidak praktis serta tidak berdampak pada kelangsungan usahanya. Sebagian besar pelaku usaha hanya menggunakan kebiasaan masa lalu saat membuat keputusan tentang peristiwa tertentu. Rendahnya penerapan akuntansi UMKM di Kecamatan Drajat Kota Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, latar belakang pendidikan, usia dan kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola keuangan UMKM dengan baik dan benar sesuai kaidah akuntansi. Selain itu, UMKM percaya bahwa penggunaan

akuntansi dalam pelaporan keuangan tidak berdampak pada kelangsungan usaha.

Banyak pelaku UMKM yang menganggap pencatatan akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, rumit, kurangnya pemahaman akuntansi sehingga mereka menganggap bahwa pencatatan akuntansi tidak begitu penting untuk menjalankan usahanya. Banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar, bahkan ada yang belum menerapkannya sama sekali. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2020), Sularsih & Sobir (2019) dan Fatkhiyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM sudah melakukan pencatatan akuntansi tetapi masih sangat sederhana serta penggunaan akuntansi yang masih sangat rendah. Permasalahan ini ada karena sebagian para pelaku UMKM berpikiran bahwa dengan menerapkan akuntansi hanya membuang waktu dan membuat semakin rumit. Seharusnya sebagian para pelaku UMKM itu dapat memahami manfaat dari pencatatan akuntansi, karena jika pengelolaan keuangan suatu usaha tidak terkelola dengan baik maka usaha tersebut dapat mengalami kebangkrutan (Savitri & Saifudin, 2018).

Dari adanya penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian penerapan akuntansi pada UMKM yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya di berbagai kota di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui apakah UMKM di Kecamatan Ngawi

Kota sudah menerapkan sistem akuntansi dasar dan apa yang menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian ini berjudul **“Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Ngawi Kota”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis mempertimbangkan pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan akuntansi pada UMKM di Kecamatan Ngawi?”. Kemudian, pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan secara lebih lanjut menjadi rumusan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi dasar yang diterapkan pada proses pencatatan dan pembukuan kegiatan operasional UMKM di Kecamatan Ngawi Kota?
2. Bagaimana pengetahuan akuntansi dasar pada UMKM di Kecamatan Ngawi Kota?
3. Bagaimana hambatan yang dialami oleh UMKM di Kecamatan Ngawi Kota dalam menerapkan akuntansi dasar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan pada proses pencatatan dan pembukuan kegiatan operasional UMKM di Kecamatan Ngawi Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa jauh pengetahuan tentang akuntansi pada UMKM di Kecamatan Ngawi Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat hambatan yang dialami oleh UMKM di Kecamatan Ngawi Kota dalam menerapkan akuntansi dasar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau acuan pertimbangan oleh pihak UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan serta memberikan masukan di dalam perencanaan.

2. **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bahan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.